

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi merupakan pengeluaran berupa dana pada masa kini agar mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu investasi pada barang berwujud yang dapat berupa tanah, emas, dan batubara, selain itu dapat juga berupa barang tidak berwujud seperti usaha, bisnis dan saham. Pemerintah dapat menyuntikkan dana untuk investasi berskala besar maupun berskala kecil. Pada skala besar, pemerintah melakukan investasi seperti membangun kawasan industri, membangun sirkuit balapan yang bertaraf internasional dan membangun infrastruktur lainnya. Sementara itu, pada skala kecil pemerintah melakukan penyuntikan modal kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

UMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan merupakan

milik warga negara Indonesia (M Kwartono, 2007). Sedangkan menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menyatakan bahwa UMKM merupakan suatu usaha yang dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dan memberikan layanan perekonomian yang luas kepada publik, dan memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan publik, menciptakan stabilitas nasional, serta membantu pertumbuhan ekonomi.

UMKM berperan sangat penting terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) per maret 2021 kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07% atau senilai dengan Rp8.573,89 triliun dengan jumlah UMKM mencapai 64,2 juta. Selain itu, UMKM mampu memberikan pekerjaan kepada masyarakat Indonesia sebesar 97% dari total tenaga kerja yang ada. Berdasarkan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa UMKM berperan sangat signifikan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan ketahanan fiskal nasional serta mengurangi permasalahan kemiskinan di Indonesia.

Di lain sisi, dengan kontribusi UMKM yang sangat signifikan terhadap ekonomi, masih saja terdapat kendala maupun permasalahan yang dialami oleh beberapa UMKM. Kendala yang paling umum ialah kurangnya modal pada saat pertama kali mendirikan UMKM dengan di satu sisi pada saat ingin meminjam uang, tingkat suku bunganya sangat tinggi. Dalam hal ini, pemerintah mengupayakan agar UMKM dapat berkembang secara terus menerus dengan cara menciptakan program kredit pemerintah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk meningkatkan sumber pembiayaan bagi UMKM sehingga masyarakat tidak

perlu khawatir jika tidak mempunyai modal atau mengalami kekurangan modal pada saat mendirikan UMKM.

Menurut Gustika (2016) menjelaskan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan suatu kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi di bidang usaha produktif dan layak namun belum bankable yang sebagian dijamin oleh perusahaan penjamin. Program KUR diluncurkan oleh pemerintah secara resmi pada tahun 2007 melalui Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara pemerintah, perusahaan penjamin dan perbankan. Bank pelaksana yang bertugas untuk menyalurkan KUR antara lain ialah PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Mandiri, PT. Bank Negara Indonesia, PT. Bank Tabungan Negara, PT. Bank Bukopin, PT. Bank Syariah Mandiri mengacu kepada basis data dari sumber Kementerian teknis, Pemerintah Daerah, Bank Pelaksana, Perusahaan Penjamin.

Sejak diluncurkannya pada tahun 2007, KUR mengalami banyak perubahan khususnya terkait kebijakan penyaluran KUR. Perubahan yang baru ialah perubahan atas kebijakan KUR yang lebih pro ke rakyat pada tahun 2020 yang bertujuan mempercepat pengembangan UMKM. Isi dari kebijakan yang diambil dari tersebut ialah sebagai berikut : 1) Suku bunga diturunkan menjadi 7% yang sebelumnya sebesar 6%; 2) Plafon KUR ditingkatkan yang sebelumnya sebesar 140 trilliun menjadi 190 trilliun dan akan terus meningkat hingga tahun 2024 sebesar 325 trilliun; 3) Peningkatan plafon KUR Mikro yang sebelumnya 25 trilliun menjadi 50 trilliun per debitur (Kemenko Perekonomian, 2020). Perubahan kebijakan KUR tersebut didasari oleh kebijakan pengembangan

UMKM dan koperasi tahun 2020-2024 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yaitu antara lain : 1) Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern; 2) Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global; 3) Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi.

Pada awalnya KUR ini hanya diprioritaskan untuk sektor usaha produktif yaitu antara lain : pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan dan jasa keuangan simpan pinjam. Dengan berjalannya waktu, pemerintah mulai membuka sekat-sekat yang ada bagi UMKM yang ingin menerima KUR, sehingga tidak sebatas pada sektor usaha produktif. Tujuan dari hal tersebut agar manfaat dari KUR ini bisa dirasakan oleh masyarakat luas dan tidak terhalang oleh sektor usaha UMKM nya.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis akan melakukan analisis untuk mengetahui bagaimana pengaruh efektivitas pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat terhadap UMKM. Analisis ini akan berfokus pada keefektifan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat terhadap UMKM khususnya di daerah Makassar. Hasil analisis tersebut akan dituangkan penulis dalam KTTA yang berjudul “ANALISIS PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP KINERJA KEUANGAN UMKM DI DAERAH MAKASSAR”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis mampu merumuskan permasalahan yang diangkat dalam penulisan KTTA yaitu sebagai berikut :

- 1) Bagaimana mekanisme pelaksanaan terhadap penyaluran KUR Mikro di Bank BRI Makassar?
- 2) Bagaimana pengaruh penyaluran KUR Mikro terhadap kinerja keuangan UMKM?
- 3) Apa saja kendala yang dihadapi pada saat penyaluran KUR Mikro?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis, tujuan penulisan dalam KTTA ini adalah :

- 1) Menganalisis mekanisme pelaksanaan penyaluran KUR Mikro pada Bank BRI Makassar.
- 2) Menganalisis pengaruh penyaluran KUR Mikro terhadap kinerja keuangan UMKM
- 3) Mengidentifikasi kendala yang dihadapi terhadap penyaluran KUR Mikro

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis melakukan analisis terhadap pelaksanaan KUR di Bank BRI khususnya di daerah Makassar. Lebih lanjut lagi, penulis akan melakukan analisis terhadap dampak pelaksanaan KUR terhadap masyarakat sekitar. Secara keseluruhan inti dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari pelaksanaan KUR terhadap masyarakat sekitar apakah sudah tepat sasaran.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang bisa diperoleh dari disusunnya karya tulis ini adalah :

- 1) Bagi penulis, karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang investasi pemerintah khususnya penyaluran KUR yang dilakukan oleh bank pelaksana kepada masyarakat. Selain itu, karya tulis ini juga diharapkan dapat memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam mencapai kelulusan pada Diploma III Kebendaharaan Negara, Politeknik Keuangan Negara STAN.
- 2) Bagi Bank BRI khususnya daerah Makassar, karya tulis ini dapat memberikan informasi dan pertimbangan dalam menyalurkan KUR sehingga bisa tepat sasaran kepada yang membutuhkan.
- 3) Bagi masyarakat, karya tulis ini menyajikan informasi mengenai gambaran umum tentang KUR yang dapat membantu jika ingin mengambil KUR di bank khususnya bank BRI.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini antara lain:

1) Studi Pustaka

Menurut M.Nazir (1998) dalam bukunya yang berjudul 'Metode Penelitian' mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan : "Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan

Metode ini digunakan penulis dalam mengumpulkan data maupun informasi yang mampu memperkuat landasan teori serta menjadi sumber acuan

dengan cara membaca, menelaah dan mempelajari buku-buku yang menjadi literatur, sumber dari internet, media massa serta sumber-sumber lain yang terkait.

2) Studi Lapangan

Studi lapangan yang akan digunakan oleh penulis adalah observasi. Menurut Suharsimi Arikunto (2010), observasi merupakan pengamatan langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan yang sedang berlangsung meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap kajian objek dengan menggunakan pengindraan.

Observasi yang penulis lakukan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah mengamati secara langsung dampak yang diberikan KUR terhadap masyarakat sekitar terkhusus daerah Makassar.

1.7 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini, penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum dari karya tulis yang akan penulis susun. Gambaran umum ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan KTTA yang masing-masing dituangkan dalam sub-bab tersendiri.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab kedua ini, akan terdiri dari dasar hukum yang digunakan, konsep dasar kredit, profil bank BRI sebagai bank pelaksana KUR, kebijakan penyaluran KUR pada bank BRI, profil UMKM yang akan dianalisis, analisis keuangan UMKM.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini, penulis akan menjelaskan metode pengumpulan data dan menguraikan mengenai gambaran umum dari objek penulisan, mekanisme pelaksanaan penyaluran KUR di Bank BRI, pengaruh penyaluran KUR terhadap kinerja keuangan UMKM, serta menjelaskan tentang kendala-kendala yang dihadapi UMKM terkait penyaluran KUR tersebut.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab keempat yang merupakan bab terakhir dari rencana penulisan KTTA penulis berisi tentang kesimpulan dari pembahasan maupun penjelasan yang ada pada bab sebelumnya.